

## **ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BUMN PERBANKAN DI KABUPATEN LANGKAT**

**An Suci Azzahra<sup>1)</sup>, Mustafa<sup>2)</sup>, Annisa Fajariah Damanik<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi  
E-mail: ansuci@dosen.pancabudi.ac.id

### **Abstract**

The research aims to analyze Good Corporate Governance (GCG) in banking BUMNs in Langkat Regency. The research uses qualitative research methods. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation methods. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that internal audit has a role in implementing GCG principles in state-owned banking in Langkat Regency. Obstacles and Obstacles in implementing GCG in state-owned banking in Langkat Regency, namely the reason is that human resources' knowledge and understanding of GCG principles is still lacking. Many human resources have not attended training or seminars. Apart from that, the implementation of the principle of transparency is also hampered by inadequate facilities and infrastructure, such as the unavailability of a website.

**Keywords:** *Good corporate governance, banking, internal control, effectiveness, BUMN*

### **PENDAHULUAN**

*Good Corporate Governance* (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai suatu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas namun suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan (Ramadhan & Nasution, 2020). Untuk mendukung terlaksananya GCG pada perusahaan maka diperlukan peran yang tinggi bagi internal auditor. Internal auditor memiliki peran sebagai pengawas atas semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, sehingga secara tidak langsung peran internal auditor diperlukan agar pelaksanaan GCG perusahaan dapat terlaksana secara efektif (Liu & Qi, 2021).

Auditor menurut Nasution et al (2021) adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji. Auditor biasanya bekerja untuk mengaudit berbagai laporan terkait keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Pemeriksaan kewajaran laporan keuangan merupakan tanggung jawab seorang auditor, dan auditor juga harus memeriksa apakah setiap laporan sesuai dengan akuntansi prinsip atau tidak (Nst et al., 2021). Auditor

yang dimaksud adalah auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu pengurus perusahaan sehingga berstatus pegawai pada perusahaan tersebut perusahaan. Auditor Internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan (tidak dapat dipisahkan) dari perusahaan struktur organisasi, dimana perannya adalah untuk memberikan pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan. Auditor internal mempunyai kepentingan terhadap efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Auditor internal merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan atau perbankan (Arnita & Nasution, 2019).

Audit merupakan proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan (Cordery et al., 2023). Para auditor bekerja untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan proses audit untuk mendeteksi berbagai kesalahan yang secara tidak sengaja telah dilakukan baik oleh manajemen maupun oleh para karyawannya. Para auditor menemukan berbagai macam kekeliruan yang berasal dari berbagai jenis kesalahan yang dibuat dalam proses kalkulasi, penghapusan, kesalahpahaman dan kesalahan menerapkan standar akuntansi, serta penggelapan dalam pemberian keterangan. Standar auditing tidak pernah membuat perbedaan antara berbagai tanggung jawab auditor dalam mencari kekeliruan maupun kecurangan, baik yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan atau penggelapan dana (Supraja, 2024).

Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dan era globalisasi menuntut dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis (Tangney et al., 2023). GCG atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi 3 formalitas, namun suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan (Afiah & Azwari, 2020). Dalam mencapai tujuannya, perusahaan harus menerapkan pengawasan atau pengendalian internal yang baik agar penyimpangan-penyimpangan bisa diminimalisir. Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan seperti penyelewengan, kecurangan, pemborosan dan pencurian baik dari pihak dalam maupun pihak luar perusahaan dalam menilai perusahaan serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan perusahaan (Aysan et al., 2023).

Selanjutnya ada proses pengawasan terhadap uang fisik yang ada dikanto Bank Mandiri Wilayah Sumatera Utara, untuk teller dan head teller, setiap sore diwajibkan mencetak semua laporan transaksi keuangan dan setiap tutup jam operasional akan disesuaikan dengan fisik uang yang ada, dan untuk jangka waktu satu kali seminggu audit internal akan melakukan atau menghitung uang kas yang ada di dalam kluis atau penyimpanan kami di hitung menggunakan mesin uang dan akan disesuaikan dengan laporan transaksi yang telah terjadi atau telah dibuat oleh teller. Lalu pengawasan untuk bagian Customer Service dilakukan secara berkala terhadap berkas-berkas nasabah yang melakukan pembukaan rekening dan berkas-berkas terkait nasabah lainnya, dan melalui pengawasan tersebut pihak audit internal sering menemukan terjadinya kelalaian terhadap berkas pembuatan rekening yang masih tidak sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi (Cárcaba et al., 2022). Struktur Organisasi ini nantinya akan lebih baik menekankan pada aspek pengawasan, kepatuhan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, *risk culture*, dan *corporate culture* dengan berorientasi kepada pelaksanaan core business utama Bank sebagai lembaga professional penghimpun dan penyalur dana. Seperti halnya pada Bank Mandiri Cabang Kabupaten Langkat, penerapan GCG sendiri sudah dalam upaya yang maksimal, namun dalam penerpananya masih didapati kendala dan permasalahan yang dihadapi para Audit Internal, sehingga masih ditemukan kelalaian yang terjadi terkait berkas-berkas yang kelengkapan yang tidak sesuai dengan standar operasional dan kecurangan seperti Fraud yang dapat memberikan dampak negative dalam proses penerapan GCG dalam perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti (Habu & Henderson, 2023). Ruang lingkup penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena secara nyata yang terjadi untuk menganalisis GCG pada BUMN perbankan di kabupaten langkat.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (McDermott, 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mengenai proses audit oleh pegawai auditor internal Bank Mandiri Cabang Kabupaten Langkat dan data-data yang diperlukan dari Bank Mandiri Cabang Kabupaten Langkat. Pada penelitian ini terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarik kesimpulan (*conclusion drawing*). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka komponen analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data perihal masalah GCG peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan selaku Head Teller yaitu sebagai berikut: Pertanyaan kepada Head Teller ditanya mengenai pelaksanaan transparancy di perusahaan, beliau mengatakan “PT Bank Mandiri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan stakeholders untuk mengakses informasi terkait visi, misi, profil perusahaan, sejarah perusahaan, laporan triwulan perusahaan di website resmi bank. Selain itu pengungkapan laporan keuangan juga dapat di akses di portal resmi OJK.” Beliau juga menambahkan bahwa “untuk menjamin transparansi maka data nasabah yang harus dirahasiakan oleh pihak eksternal bank. Para stakeholders hanya dapat mengakses melalui laporan publikasi OJK dan website resmi bank”.

Pertanyaan mengenai Accountibility beliau menjawab bahwa “PT Bank Mandiri sudah mengkategorikan anggotanya sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya”. Pertanyaan mengenai Responbility beliau menjawab bahwa “dalam

pemberian kredit yaitu bank menerapkan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral” Pertanyaan mengenai Independency beliau menjawab bahwa “semua organ pada PT Bank Mandiri harus terbebas dari konflik politik dan pengambilan keputusan juga dilakukan saat rapat dan keputusan yang dibuat juga harus keputusan bersama”.

Pertanyaan mengenai Fairness beliau menjawab bahwa “ada wadah bagi setiap organ pada PT Bank Mandiri untuk menyampaikan pendapat yang biasa dilakukan rapat mingguan dan breaving untuk bagian kredit setiap hari” beliau juga menjawab bahwa pemberian kompensasi sudah wajar kepada para anggota indikatornya UMR, sudah. Terkadang ada beberapa bagian yang mendapatkan bonus (rewards) seperti bagian marketing dan collection, karena sudah sesuai dengan target penjualan dan penangihan di setiap minggunya. Kalau untuk seluruh karyawan juga dapat bonus, tetapi dilihat lagi dari kondisi perusahaan”. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan selaku auditor yaitu sebagai berikut: Ketika ditanya mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance di perusahaan, beliau mengatakan “Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Mandiri yaitu sebagai upaya mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional ataupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan dan juga mendorong agar Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan”.

Pertanyaan kedua “Menurut anda bagaimana kedudukan Audit Internal di Bank Mandiri?” Informan menjawab “Internal Audit dalam organisasi berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit”. Sejak 18 Desember 2014, Internal Audit memiliki 3 Group yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group dan IT Audit Group. Selain itu Internal Audit juga memiliki 2 Departemen

yang bertanggung jawab langsung kepada Chief Audit Executive (CAE) yaitu investigation Audit Department dan Quality Assurance Department dan IT Audit Group. Dari hasil wawancara dengan informan tersebut Audit Internal adalah salah satu kegiatan untuk menjaga nilai perusahaan dalam hal menghindari kegiatan kegiatan perusahaan yang akan menimbulkan dampak negatif kegiatan operasional perusahaan.

Pertanyaan “ Bagaimanakah sistem pelaporan hasil Audit di Bank Mandiri ?” Informan mengatakan bahwa “Yang pertama Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Lalu yang kedua, Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Yang ketiga, Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dan yang terakhir, Komite Audit harus membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”. Dari hasil wawancara dengan Informan tersebut diartikan bahwa Komite Audit harus melaporkan hasil Audit berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi secara langsung maka peneliti menyimpulkan bahwa peran auditor internal dalam pelaksanaan GCG sudah efektif, dan secara keseluruhan sudah memadai. Dikatakan sudah efektif karena auditor internal telah berupaya melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan sistem kontrol, pada semua aktivitas perusahaan dengan sangat baik dan berusaha selalu melakukan peningkatan terhadap kualitas kinerja. Semua aktivitas auditor internal dalam melakukan audit operasional perusahaan dan sistem manajemen perusahaan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan berdasarkan pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) serta menerapkan prosedur

dan didukung oleh dokumen yang memadai, serta telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Auditor telah menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tahapan audit internal dengan berpedoman pada Internal Audit Charter kegiatannya meliputi melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan seluruh unit kerja. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Pimpinan. Melakukan komunikasi dengan pihak regulator. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan. Mengakses seluruh informasi, catatan, pegawai, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan pegawai dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Perseroan, Entitas Anak dan afiliasi sesuai peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2020). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Arnita, V., & Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Samosir Danau Toba. In *Riset Akuntansi Keuangan* (Vol. 4, Issue 2).
- Aysan, A. F., Bakkar, Y., Ul-Durar, S., & Kayani, U. N. (2023). Natural resources governance and conflicts: Retrospective analysis. *Resources Policy*, 85(PA), 103942. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103942>
- Cárcaba, A., Arrondo, R., & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? *European Research on Management and Business Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2021.100192>
- Cordery, C. J., Goncharenko, G., Polzer, T., McConville, D., & Belal, A. (2023). NGOs' performance, governance, and accountability in the era of digital transformation. *British Accounting Review*, 55(5), 101239. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101239>
- Habu, A. A., & Henderson, T. (2023). Data Subject Rights As A Research Methodology: A Systematic Literature Review. *Journal of Responsible Technology*, 16(October). <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100070>
- Liu, D., & Qi, X. (2021). Smart governance: The era requirements and realization path of the modernization of the basic government governance ability. *Procedia Computer Science*, 199, 674–680. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.083>

- McDermott, R. (2023). On The Scientific Study of Small Samples: Challenges Confronting Quantitative and Qualitative Methodologies. *Leadership Quarterly*, 34(3), 101675. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2023.101675>
- Nasution, D. A. D., Muda, I., Sumekar, A., & Abubakar, E. (2021). Analysis of The Economic Behavior of Society E-Commerce as An Impact on The Development of The 4.0 Industrial Revolution and Society 5.0. 1–9. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2305669>
- Nst, A. P., Sebayang, S., & Nasution, D. A. D. (2021). Enhance Successful Identification of E-Government Management in Realizing Good Government Governance in the Government of the City Of Binjai. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5120–5133. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2301>
- Ramadhan, P. R., & Nasution, D. A. D. (2020). Analisis Determinan Harga Saham Perusahaan Sektor Agriculture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5569>
- Supraja, G. (2024). The Role of Sales Accounting Information System in PT. Petro Gasindo Intiniaga. *Basic and Applied Accounting Research Journal*, 3(2), 76–81. <https://doi.org/10.11594/baarj.03.02.04>
- Tangney, P., Star, C., Sutton, Z., & Clarke, B. (2023). Navigating collaborative governance: Network ignorance and the performative planning of South Australia's emergency management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 96(August), 103983. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103983>